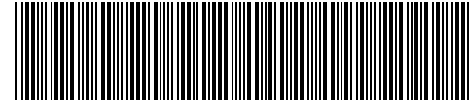




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.409208/2024**



DS:7207-5743-6536-8729

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 4. Kode>Nama Satker : (409208) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
- Sebesar : Rp. 261.272.000 (DUA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen

013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	261.272.000
Rp.	261.272.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	261.272.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 261.272.000

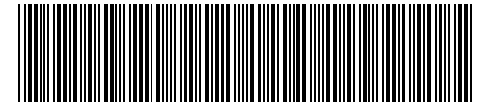
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409208/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7207-5743-6536-8729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode>Nama Satker : (409208) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen		261.272.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		261.272.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti		
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian 261.272.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	4,00 Rekomendasi Kebijakan 255.176.000
		02	ABD.002	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00 Rekomendasi Kebijakan 6.096.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.11.2.409208/2024

I B. SUMBER DANA



DS:7207-5743-6536-8729

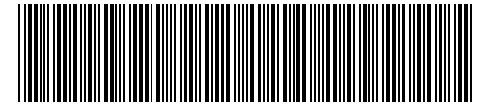
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode>Nama Satker : (409208) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	261.272.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	261.272.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409208/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7207-5743-6536-8729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409208) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409208	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	-	261.272	-	-	-	261.272		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	261.272	-	-	-	261.272		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	261.272	-	-	-	261.272		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	261.272	-	-	-	261.272	20 . 51	
01	RM	-	261.272	-	-	-	261.272	060	
JUMLAH		-	261.272	-	-	-	261.272		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409208/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7207-5743-6536-8729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409208) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409208	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	9.120	42.346	52.686	71.680	46.800	15.840	7.320	10.800	4.680	0	0	261.272
		BELANJA BARANG	0	9.120	42.346	52.686	71.680	46.800	15.840	7.320	10.800	4.680	0	0	261.272
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	0	9.120	42.346	52.686	71.680	46.800	15.840	7.320	10.800	4.680	0	0	261.272
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	9.120	42.346	52.686	71.680	46.800	15.840	7.320	10.800	4.680	0	0	261.272

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409208/2024
IV A. B L O K I R**



DS:7207-5743-6536-8729

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [409208] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

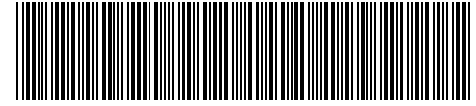
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409208/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:7207-5743-6536-8729

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [409208] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002